GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar : **kompas** **Tanggal** : **14 mei 2007**

Subyek : **membangun Pulau Kecil** **Hari** : **Senin**

Halaman : **23**

Bangun Pulau Kecil Melalui Unsur-unsur Kearifan Lokal

Yogyakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mulai mendata dan menamai 22 pulau kecil di pesisir Pantai Selatan. Pulau-pulau tak berpenghuni di Kabupaten Gunung Kidul itu akan menjadi salah satu dasar penentuan batas wilayah laut Indonesia.

Menurut Kepala Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan DIY Haryanto, pendataan akan dilakukan dua hari mulai Senin (14/5). Departemen Dalam Negeri akan membawa hasil pendataan itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Agustus 2007. "Saat ini hanya 14 pulau ada di peta. Dengan dinamai, akan menunjukkan kepemilikan kita dan menunjukkan koordinatnya," ujar Pembuat Sketsa Pulau dan Koordinat Sutarjo, Sabtu.

Tim yang terdiri dari akademisi, TNI AL, Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah ini mencoba mengidentifikasi dua pulau terjauh di perbatasan dengan Kabupaten Bantul pada Kamis pekan lalu.

Dari hasil identifikasi, sebuah pulau dinyatakan hilang akibat gempa. Pascagempa, beberapa pulau diperkirakan retak dan tidak lagi bisa didefinisikan sebagai pulau.

Identifikasi pulau-pulau itu sudah dilakukan tahun 2003 dengan dana dari APBD provinsi. Identifikasi belum sampai pada tahap pembakuan nama pulau dan hanya memetakan dari peta bumi di laboratorium.

Saat ini, beberapa pulau telah teridentifikasi dari julukan yang diberikan oleh penduduk sekitar, antara lain Pulau Watulumbung, Karangmamang, Gunung Gandul, dan Layar. Pulau-pulau itu masuk wilayah Kecamatan Panggang, Tanjung Sari, Girisubo, dan Tepus, Gunung Kidul.

Kearifan lokal

Sementara itu, di Ambon, Direktur Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Ferrianto H Djais, Sabtu, mengatakan, pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia perlu memerhatikan kearifan lokal masyarakat guna mencapai pembangunan yang lestari.

"Kami mencoba dari bawah, tidak memaksakan aturan dari atas. Kami harus menyadari ada keunikan di setiap daerah. Spesifikasi lokal ini coba kita atur supaya jangan ada kekakuan hukum," kata Ferrianto.

Di Maluku, misalnya, ada sistem sasi—mengatur kapan bisa mengambil sumber daya alam. Di Labuhan, Banten ada aturan penempatan bagan dan jalur-jalur perahu. Semua aturan dibuat agar setiap orang bisa memanfaatkan laut bersama-sama.

"Kami mengarahkan pemanfaatan ruang berdasar aturan hukum positif dan sejauh mungkin mengadopsi yang telah dilakukan masyarakat," kata Ferrianto. Hukum adat tidak tertulis itu menjaga alam untuk anak-cucu.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Alex SW Retraubun, Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil DKP, pada Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia, antara lain, mengatakan, keterbatasan potensi di pulau-pulau kecil bisa diatasi dengan membuat kluster-kluster pengembangan berdasar kesamaan potensi. (ANG/AB9

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup